



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

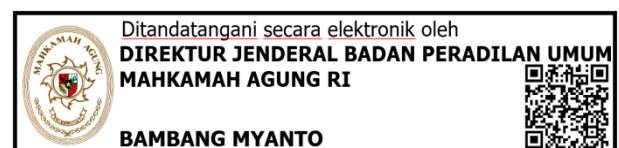
Nomor : 508/DJU/HM.02.3/4/2023 Jakarta, 3 April 2023
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP
Tingkat Pertama Versi 5.2.0 dan
Aplikasi E-Court Versi 5.0.0

Yth. **1. Ketua Pengadilan Tinggi**
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 670/SEK/HM.02.3/3/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.2.0 dan Aplikasi E-Court Versi 5.0.0 (terlampir), dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memastikan pembaruan SIPP di Pengadilan Negeri masing-masing dan Ketua Pengadilan Tinggi agar memantau seluruh proses pembaruan SIPP Pengadilan Negeri diwilayah hukum masing-masing.

Pengadilan Tinggi diminta untuk melaporkan Pengadilan Negeri yang sudah dan yang belum melakukan pembaruan melalui email satgabadilum@gmail.com paling lambat tanggal 14 April 2023 dan apabila mengalami kendala dapat menghubungi Satuan Tugas SIPP Pengadilan Tinggi masing-masing yang akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas SIPP Pusat.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 670/SEK/HM.02.3/3/2023
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi
SIPP Tingkat Pertama Versi 5.2.0 dan
Aplikasi e-Court Versi 5.0.0

31 Maret 2023

Yth. Bapak/Ibu

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI

di -

Tempat

Menindaklanjuti Disposisi KMA nomor:259/SetKMA/INT/IV/22 tanggal 18 April 2022 perihal pengembangan e-Court untuk Sidang Penetapan Dismissal Dan Pemeriksaan Upaya Hukum Perlawanan Atas Penetapan Dismissal, disposisi KMA nomor:260/SetKMA/INT/IV/22 tanggal 18 April 2022 perihal pengembangan e-Court bagi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor:2899/DjA.3/OT/6/2022 perihal permintaan API (*Application Programming Interface*) SIPP Mahkamah Agung, Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor:1877/DjMT/B/OT.01.3/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Permintaan mengubah nomenklatur klasifikasi tindak pidana pada Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Militer, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 8/WKMA.NY/SB/2/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Penugasan Pengembangan aplikasi SIPP dan Aplikasi e-Court tahap II, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Penyempurnaan Fitur pada Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama dengan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP dari versi 5.1.1 menjadi versi 5.2.0
2. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama agar melakukan pencadangan (*backup*) aplikasi dan basis data Aplikasi SIPP terlebih dahulu sebelum menjalankan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP dari versi 5.1.1 menjadi 5.2.0
3. Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan Proses Pembaruan Aplikasi SIPP dari versi 5.1.1 menjadi versi 5.2.0.
4. Masing-masing Badan Peradilan agar menginformasikan ke Seluruh Pengadilan Tingkat Banding agar mendukung dan turut memantau pelaksanaan Pembaruan Aplikasi SIPP Versi 5.2.0 yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

5. Telah dilakukan Penyempurnaan Fitur pada Aplikasi e-Court dengan proses Pembaruan Aplikasi e-Court dari versi 4.0.0 menjadi versi 5.0.0.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Rian Andri Salam, S.Kom, MMSI. (Kasubag Pengembangan Sistem Aplikasi) di nomor HP/WA 08159156404 atau sdr. Yunawan Kurnia, S.Kom, MT. (Kasubag Bimbingan Teknis) di nomor HP/WA 08569716311 atau sdr. Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.Kom, MH. (Kasubag Pengembangan Teknologi Informasi) di nomor HP/WA 08111739800.

Demikian, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lampiran I

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 670/SEK/HM.02.3/3/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

Berikut perbaikan, penambahan dan optimalisasi pada fitur maupun fungsi yang telah diterapkan pada aplikasi SIPP versi 5.2.0 antara lain :

Semua Lingkungan Badan Peradilan :

- Penambahan dan penyesuaian aplikasi dan database aplikasi SIPP, e-BERPADU, e-Court dan SPPT-TI untuk Satuan Kerja Baru yaitu 13 Satuan Kerja Tingkat Banding dan 38 Satuan Kerja Tingkat Pertama
- Penambahan tombol Tidak Ada Saksi pada fitur Penambahan Saksi
- Anonimasi data sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan pada SIPP Web
- Perbaikan pagination halaman pada SIPP Web
- Penyesuaian tampilan detail informasi pada fitur eksekusi
- Penyempurnaan pada fitur pencarian detail tilang, delegasi masuk, delegasi keluar
- Pendaftaran verzet melalui e-Court
- Penambahan fitur verifikasi pendaftaran perkara dalam hal pengajuan pembebasan biaya perkara
- Penambahan fitur Panggilan Sidang/pemberitahuan Putusan secara elektronik melalui Surat Tercatat.
- Perbaikan Integrasi SIPP dan e-BERPADU

Lingkungan Badan Peradilan Umum :

- Pendaftaran konsinyasi melalui e-Court
- Pendaftaran permohonan pembatalan arbitrase
- Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 72/SEK/SK/I/2023 tentang Pemberlakuan Nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna

Lingkungan Badan Peradilan Agama :

- Penambahan identitas anak pada data umum jenis perkara cerai talak dan cerai gugatan
- Penambahan pencatatan nafkah anak setelah pembacaan putusan pada jenis perkara cerai talak dan gugat
- Penambahan alasan dispensasi, identitas calon pengantin pria dan Wanita pada jenis perkara dispensasi kawin
- Penambahan alasan pada jenis perkara itsbat nikah
- Penambahan alasan dan penghasilan pemohon pada jenis perkara ijin poligami
- Penambahan pelaksanaan eksekusi dan identitas anak pada eksekusi anak pada jenis perkara eksekusi
- Penambahan objek Wakaf sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 pada data umum jenis perkara wakaf
- Penambahan alasan permohonan asal usul anak, identitas anak pada jenis perkara Asal Usul Anak
- Penambahan alasan pengesahan anak dan identitas anak pada jenis perkara Pengesahan Anak
- Penambahan alasan dan identitas anak pada jenis perkara penguasaan anak
- Penambahan alasan pada pembatalan perkawinan
- Penambahan referensi KUA seluruh Indonesia pada inputan Nama KUA Perkara Cerai dan Itsbat Nikah
- Pendaftaran permohonan pembatalan arbitrase syariah

Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara :

- Penambahan fitur pendaftaran perkara Pilkada melalui e-Court
- Penambahan fitur pendaftaran perkara perlawanan dismissal melalui e-Court
- Penambahan kolom saran pada perbaikan gugatan

Lingkungan Badan Peradilan Militer :

- Perbaikan menu SIPP Web pada Dilmiltama dan Dilmilti
- Perubahan dan Penambahan pada klasifikasi perkara

Lampiran II

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 670/SEK/HM.02.3/3/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

Berikut perbaikan, penambahan dan optimalisasi pada fitur maupun fungsi yang telah diterapkan pada aplikasi

e-Court versi 5.0.0 antara lain :

- Perekaman Data Kurator/Pengurus sebagai fitur Pangkalan Data Kurator/Pengurus
- Penyesuaian terhadap kewenangan Panitera Pengganti dalam Proses Persidangan Hybrid
- Perekaman Data Surat Tercatat
- Penambahan fitur Pendaftaran Perkara dengan Pembebasan Biaya
- Penambahan fitur Penetapan Dismissal *Process*
- Penambahan fitur Penetapan Pencabutan Gugatan
- Penambahan fitur Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal *Process*
- Penambahan fitur Upaya Hukum Verzet
- Penambahan fitur Pemeriksaan Persiapan
- Penambahan fitur *Court Calendar*
- Penambahan fitur Penyampaian File Bukti (Agenda Persidangan Pembuktian)
- Penambahan fitur Putusan Sela
- Penyempurnaan pada Administrasi Berkas Perkara Perdata Khusus Kepailitan dan PKPU
- Penambahan Kewenangan pada User Meja III dan Meja e-Court untuk mendaftarkan Permohonan Banding secara Elektronik
- Penambahan fitur terhadap Penambahan Panjar
- Penambahan fitur untuk Penyampaian Pencabutan Kuasa secara Elektronik
- Penambahan fitur untuk Perubahan Gugatan
- Penambahan fitur untuk Pendaftaran Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase
- Penambahan fitur untuk Pendaftaran Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase Syar'iyah
- Penambahan fitur untuk membatasi Penyampaian Memori Banding
- Penambahan fitur Permintaan Berkas Tambahan oleh Tingkat Banding
- Penyesuaian Terhadap Bundel A dan Bundel B
- Proses Inzage dapat dilakukan secara Hybrid